

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bidang pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan. Indonesia dikenal secara luas oleh masyarakat lokal dan internasional sebagai negara yang memiliki kekayaan potensi pariwisata. Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan sumber pendapatan devisa terbesar bagi negara. Keberagaman alam, budaya, wilayah, dan masyarakat yang beragam merupakan ciri khas Indonesia yang memberikan peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata, terutama dalam pengembangan pariwisata di desa. Melalui pengembangan pariwisata di desa, akan tercipta dampak positif pada pembangunan negara.

Seringkali desa dianggap sebagai wilayah yang mengalami keterbelakangan, namun hal ini menjadi tantangan dalam mencapai pembangunan yang berhasil di wilayah pedesaan. Soleh (2017:35) mengungkapkan bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai pembangunan yang sukses di wilayah pedesaan yang berbeda dengan tantangan di masa lalu. Dua tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan wilayah pedesaan adalah tantangan internasional terkait liberalisasi investasi dan perdagangan global, serta tantangan internal seperti perubahan ekonomi domestik, migrasi, ketahanan pangan, lahan pertanian, investasi, modal, teknologi, sumber daya manusia, lingkungan, dan sebagainya.

Agar potensi pariwisata desa dapat dimanfaatkan secara optimal, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Arifin (2017:113) menjelaskan bahwa pengembangan destinasi pariwisata dapat dilakukan dengan melibatkan serta memberdayakan masyarakat lokal. Dalam hal ini, masyarakat turut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terkait pembangunan pariwisata di wilayah mereka.

Mendorong pemberdayaan desa wisata adalah salah satu cara untuk mengembangkan pariwisata desa. Saat ini, pemberdayaan desa wisata semakin menjadi sorotan karena meningkatnya permintaan wisatawan terhadap pariwisata dan adanya peluang bisnis yang besar di sektor pariwisata di masa depan. Konsep pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan potensi dan kemampuan pengelolaan pariwisata desa melalui pemanfaatan pengetahuan dan kemandirian masyarakat, kerjasama antar masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti yang diungkapkan oleh Trisnawati et al. (2018:32).

Menitikberatkan pada konsep desa wisata, pengembangan desa wisata sebagai opsi alternatif dalam pengembangan pariwisata dapat berkontribusi pada pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di sektor pariwisata (Zakaria & Suprihardjo, 2014:264). Selain itu, pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan secara bersamaan dengan pengembangan desa wisata. Namun, saat ini masyarakat masih belum siap dalam mengorganisir dan mengelola desa wisata di wilayah mereka.

Berdasarkan pendekatan *community based tourism*, muncul suatu konsep yang dikenal dengan Desa Wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Desa Wisata mengacu pada suatu wilayah yang menggabungkan berbagai daya tarik wisata dengan struktur kehidupan masyarakat dan tradisi lokal yang ada di sekitarnya (Effreyza, 2019:3). Anwas (dalam Ika, 2020:3) menegaskan bahwa masyarakat harus menyadari potensi wisata di desa mereka dan meningkatkan kemampuan serta kapasitas untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan keberhasilan desa wisata sangat bergantung pada pengelolaannya.

Sidiq dan Resnawaty (2017:43) mengungkapkan bahwa fokus pada pengembangan desa wisata berkelanjutan di sektor pariwisata dapat memberikan manfaat berupa peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dari pengembangan desa wisata adalah memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola aset-aset yang tersedia sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

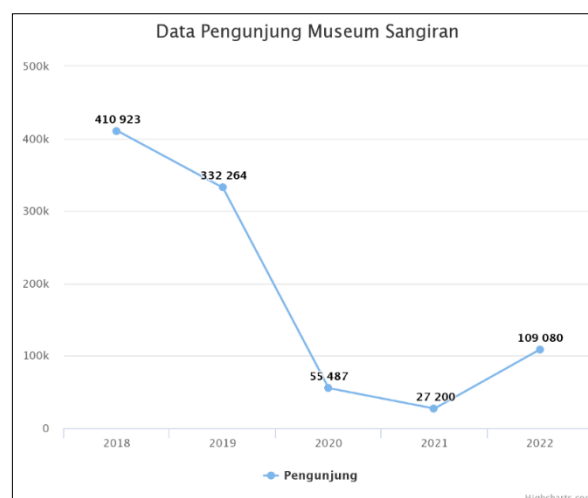
Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pariwisata desa karena memiliki keunikan dan peninggalan budaya yang menarik bagi wisatawan. Simamora dkk. (2016:87) menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata yang mempertimbangkan karakteristik kealamian dan dinamika sosial budaya masyarakat setempat dapat menjadi daya tarik yang kuat bagi para wisatawan. Oleh karena itu, Kabupaten Sragen memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata.

Berbagai desa wisata telah dikembangkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Desa Wisata Krikilan yang terletak di Kabupaten Sragen. Desa yang

bertumbuh besar bersama Museum Sangiran ini telah diresmikan sebagai desa wisata oleh Pemerintah Kabupaten Sragen pada 11 November 2016 melalui Surat Keputusan (SK) Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Desa Wisata Krikilan memiliki potensi wisata yang kaya, seperti situs purbakala, kearifan lokal dan nilai budaya, serta keunikan ekonomi kreatif.

Perintisan Desa Krikilan sebagai desa wisata sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang mencantumkan bahwa pelestarian cagar budaya bertujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pelestarian situs Sangiran juga diarahkan untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Meskipun masuk ke dalam daerah cagar budaya Sangiran dan telah ditetapkan sebagai *World Culture Heritage* oleh UNESCO sejak tahun 1996, pada kenyataannya upaya pengelolaan desa wisata ini menemui beberapa hambatan, salah satunya adalah adanya pandemi COVID-19 yang berdampak cukup besar di berbagai sektor, terutama pariwisata.

Gambar 1.1. Data Pengunjung Museum Sangiran Tahun 2018-2022



Sumber: Pusat Data Teknis Sangiran, 2022

Gambar 1.1. di atas menggambarkan bahwa pengunjung Museum Sangiran pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana berdampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata, terutama Desa Wisata Krikilan yang menjadi *visitor center* Museum Sangiran. Menurut Sukronedi dan Haryono (2015:6), masalah lainnya adalah kurangnya partisipasi dan kontribusi dari masyarakat, serta belum tercapainya pengelolaan yang terpadu antara *stakeholder*.

Uniknya, Desa Wisata Krikilan menjadikan tahun 2021 sebagai momentum titik balik pascapandemi. Dibuktikan dengan mulai merangkak naiknya pengunjung dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun ketiga sejak perintisan, Desa Wisata Krikilan berhasil menyabet penghargaan 50 Desa Wisata Terbaik dan Juara 5 Desa Terbaik Kategori *Homestay* dalam ajang Anugerah Desa Wisata (ADWI) 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Perkembangan tersebut menjadikan Desa Wisata Krikilan sebagai satu-satunya desa yang berasal dari Kabupaten Sragen yang terverifikasi sebagai desa berkembang di Jejaring Desa Wisata.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai pengembangan *community based tourism* di Desa Wisata Krikilan serta untuk menganalisis sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberhasilan pengembangan *community based tourism* di Desa Wisata Krikilan tahun 2021?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan *community based tourism* di Desa Wisata Krikilan tahun 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis keberhasilan pengembangan *community based tourism* di Desa Wisata Krikilan tahun 2021; dan
2. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan *community based tourism* di Desa Wisata Krikilan tahun 2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penulis berharap, penelitian ini menjadi informasi pelengkap dalam perkembangan akademis/perkembangan ilmu pengetahuan di bidang politik dan pemerintahan, serta menjadi pembelajaran di bidang pengembangan desa wisata;
 - b. Penulis juga berharap, penelitian ini menjadi sumber yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang di masa depan sebagai sarana pembelajaran dan pembuka wawasan dalam bidang pengembangan desa wisata; dan
 - c. Selain itu, penulis berharap, penelitian ini mampu menjadi referensi pembelajaran mengenai permasalahan desa wisata.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan desa wisata dengan melibatkan semua pihak terkait sehingga mereka dapat memainkan peran strategis dalam pengembangan desa wisata. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait diharapkan dapat turut serta dalam meningkatkan kompetensi masyarakat lokal sehingga terjadi pemberdayaan masyarakat lokal.

1.5. Penelitian Terdahulu

Pada proses penyusunan skripsi ini, peneliti menggali informasi dari berkaca pada penelitian sebelumnya sebagai acuan perbandingan untuk mengkaji kelebihan atau kekurangan yang telah ada. Penggalan terhadap penelitian sebelumnya juga dalam rangka mendapatkan informasi yang telah ada mengenai teori yang selaras dan berkaitan dengan judul yang digunakan. Dalam penelitian Manaf, A., dkk. (2018) yang berjudul *Community-Based Rural Tourism in Inter-Organizational Collaboration: How Does It Work Sustainably? Lessons Learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia* dilatarbelakangi oleh konsep CBT yang dinilai tepat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan memobilisasi masyarakat lokal (pengetahuan dan kemampuan lokal), khususnya untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan budaya yang ada di daerah sekitar mereka untuk pengembangan pariwisata. Kurangnya pengalaman masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, serta ketergantungan mereka pada keahlian eksternal telah diatasi sebagai tantangan

dalam CBT. Oleh karena itu, pengembangan suatu destinasi wisata tidak dapat dipisahkan dari berbagai peran pemangku kepentingan.

Penelitian tersebut menganalisis kegiatan pengembangan pariwisata berbasis desa di Desa Wisata Nglanggeran, yang terletak di Patuk, Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta, Indonesia yang dipilih karena dianggap berhasil dan berkelanjutan. Hasilnya dapat dilihat dari keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat dan kemampuannya untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan taraf hidup masyarakat setempat. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana kolaborasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan antar organisasi terkait, yang diprakarsai oleh masyarakat setempat, khususnya para pemuda, telah memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan program. Data dan informasi untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Studi ini menemukan bahwa komunitas lokal memiliki peran utama dalam pelaksanaan program, di antara berbagai entitas pemangku kepentingan. Mulai dari masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama melalui kelompok sadar wisata terlibat dalam pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan kegiatan pariwisata. Kemudian, pemerintah pusat hingga desa sebagai fasilitator. Sampai dengan, lembaga nirlaba publik/swasta sebagai penyedia kegiatan pariwisata dan sarana promosi. Di sisi lain, memastikan bahwa masyarakat lokal dengan kolaborator tetap terlibat dan memiliki peran kunci dalam pengelolaan destinasi wisata sehingga porsi utama manfaat dan penggunaan tetap berada di masyarakat lokal itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini menyatakan bahwa hal ini merupakan kunci keberhasilan dan keberlanjutan program.

Studi Rizkianto N. (2017) berjudul Implementasi Ide Wisata Berbasis Komunitas dalam Manajemen Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek). Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh banyak daya tarik wisata yang dapat dikelola. Namun, pemahaman masyarakat desa tentang pariwisata masih kurang, yang menyebabkan pengelolaan daya tarik wisata tersebut berjalan lambat dan belum memiliki arah pengelolaan yang jelas yang mematuhi prinsip keberlanjutan. Ladewi Bangun, yang berfungsi sebagai wadah masyarakat untuk mengelola seluruh daya tarik wisata, belum memiliki konsep perencanaan yang matang, seperti yang ditunjukkan oleh manajemennya yang lamban dan tidak jelas. Sehingga pembangunan desa wisata Desa Bangun dapat terus berlanjut dan mencegah konflik sosial di masa mendatang, Ladewi Bangun dan pihak-pihak yang bertanggung jawab harus membuat standar pengelolaan yang jelas.

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana masyarakat Desa Wisata Bangun, khususnya melalui lembaga desa wisata, menerapkan konsep pariwisata berbasis masyarakat (CBT) pada objek wisata utama mereka, Air Terjun Wonoasri. Penelitian ini juga ingin memahami peran berbagai pihak yang terlibat dalam upaya menjadikan wisata desa ini berkelanjutan. Dengan menggunakan metode studi kasus kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam, serta diskusi kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Desa Wisata Bangun merupakan hasil inisiatif mandiri dari masyarakat setempat yang melihat potensi wisata alam di desa mereka. Masyarakat secara bersama-sama membentuk organisasi desa wisata dan menyusun

program pengelolaan untuk objek wisata utama, yaitu Air Terjun Wonoasri. Keputusan dan tindakan kolektif ini telah mendorong munculnya berbagai usaha ekonomi masyarakat yang berbasis pariwisata.

Terakhir, penelitian Dewi, M. H. U., dkk. (2013) yang berjudul Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh realita di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata belum berpihak kepada masyarakat Jatiluwih. Sebaliknya, kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada kaum kapitalis (investor). Mulai dari petani yang tetap miskin karena investor meraup keuntungan besar melalui terasering sawah, investor dibiarkan membangun vila di tengah hutan yang melanggar radius kesucian pura, sampai dengan ketidakadilan ekonomi yang berpotensi terjadinya konflik antara masyarakat lokal dengan pendatang sebagai imbas dari kaum kapitalis yang membangun area kompetisi perebutan lapangan pekerjaan dan modal. Oleh karena itu, memberi ruang gerak bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan sangat diperlukan karena hal tersebut berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata serta untuk merancang model pengembangan desa wisata yang memprioritaskan partisipasi komunitas setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dan data dikumpulkan melalui tinjauan literatur, wawancara mendalam, dan observasi nonpartisipan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Jatiluwih belum melibatkan masyarakat lokal secara

efektif. Peran pemerintah tampak sangat dominan, padahal menurut prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan, pemerintah seharusnya berfungsi sebagai fasilitator dan memberikan peran serta manfaat yang lebih signifikan kepada komunitas lokal. Dibutuhkan adanya kemauan politik dari pemerintah untuk mengurangi keterlibatannya dalam pengembangan desa wisata dan membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi.

Dari beberapa penelitian di atas, disebutkan bahwa masyarakat memiliki peran utama dalam keberhasilan pembangunan pariwisata yang mengacu pada CBT serta desa wisata. Di mana dengan adanya pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini akan membuat masyarakat berinisiatif dan memiliki kesadaran bersama bahwa desanya memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan. Terlepas dari keberhasilan tersebut, beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pengembangan desa wisata dan pariwisata berbasis masyarakat. Seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan pola pikir masyarakat yang cenderung bergantung pada pemerintah. Sehingga kendala tersebut menjadi penghambat tersendiri dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya hampir keseluruhan mengkaji mengenai pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan walaupun ada yang membahas partisipasi masyarakat, hanya disampaikan secara normatif dan belum terdapat identifikasi lebih mendalam mengenai pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Secara garis besar, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu mengkaji tentang pengembangan desa wisata dan

partisipasi masyarakat. Fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu mengenai analisis pengembangan *community based tourism* di Desa Wisata Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen tahun 2021. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada bagian judul, objek yang diteliti, serta teori yang digunakan dalam penelitian. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan desa wisata yang sesuai dengan indikator ideal *community based tourism*.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Desa Wisata

Desa wisata merupakan implementasi dari konsep pariwisata yang berlandaskan partisipasi masyarakat dan prinsip keberlanjutan. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat menciptakan pemerataan manfaat sesuai dengan kerangka pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, keberadaan desa wisata berpotensi meningkatkan nilai budaya lokal sebagai daya tarik wisata, sambil memastikan bahwa nilai-nilai budaya tersebut tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan.

Menurut Inskeep (1991), desa wisata didefinisikan sebagai bentuk pariwisata di mana sekelompok kecil wisatawan menginap di atau dekat kehidupan tradisional atau desa terpencil dan mempelajari aspek kehidupan dan lingkungan desa tersebut. Sementara itu, Nuryanti (1992) mengartikan desa wisata sebagai kombinasi dari atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam kerangka struktur kehidupan masyarakat yang selaras dengan adat dan norma lokal. Dua komponen utama desa wisata adalah: (1) akomodasi, yang mencakup sebagian

dari tempat tinggal penduduk setempat dan/atau unit-unit akomodasi yang berkembang sejalan dengan pola tempat tinggal penduduk, dan (2) atraksi, yang mencakup aktivitas sehari-hari penduduk serta kondisi fisik lokasi desa yang memungkinkan wisatawan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan aktif, seperti kursus tari, bahasa, seni lukis, dan aktivitas lainnya.

Desa wisata merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan pariwisata berbasis komunitas. Totok Mardikanto et al., sebagaimana dikutip dalam Effreyza (2019:7), mendefinisikan desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menonjolkan keaslian suasana pedesaan, mencakup aspek sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, serta karakteristik arsitektur dan tata ruang desa yang khas. Dalam konteks ini, terdapat berbagai potensi, aktivitas, dan kegiatan ekonomi yang unik dan menarik, yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari komunitas setempat.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pariwisata di daerah, pengembangan desa wisata berbasis masyarakat dianggap sebagai aset yang penting. Oleh karena itu, diperlukan pemenuhan atas prinsip-prinsip berikut:

1. Untuk membangun desa wisata berbasis masyarakat, penting untuk memperhatikan kearifan lokal masyarakat di wilayah setempat, seperti adat istiadat dan budaya. Kehidupan sosial budaya perlu menjadi perhatian utama dan disesuaikan dengan pola perilaku, kebiasaan, dan tata cara yang berlaku di wilayah tersebut. Selain itu, wisatawan yang berkunjung juga

diharapkan untuk memahami dan menghargai budaya, tata cara, serta karakteristik wilayah tersebut.

2. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat harus fokus pada peningkatan kualitas lingkungan di wilayah setempat. Namun, pembangunan yang dilakukan harus menghargai ciri khas yang sudah ada di wilayah tersebut dan tidak berupaya untuk mengubahnya. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan aspek-aspek yang sudah ada sebagai daya tarik bagi wisatawan, tanpa mengganggu kearifan lokal dan tetap menarik bagi mereka.
3. Sarana dan prasarana desa wisata yang terhubung dengan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kegiatan pariwisata di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar Desa Wisata agar mereka dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dengan memberikan layanan dan jasa. Diharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata dapat memberikan manfaat langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat di luar kegiatan utama mereka.
4. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat menghasilkan pemerataan dan keadilan di berbagai lapisan masyarakat, sejalan dengan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Selain itu, pembentukan desa wisata berpotensi mendukung promosi produk wisata yang menonjolkan kearifan lokal serta keaslian budaya, lingkungan, dan sosial desa, sambil memastikan bahwa aspek-aspek tersebut tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan potensi lokal merujuk pada pendekatan pengembangan pariwisata yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam model ini, kegiatan pariwisata dimiliki, dioperasikan, dikelola, dan dikoordinasikan oleh komunitas lokal. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini perlu didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat sambil melestarikan identitas budaya lokal;
2. Meningkatkan pendapatan ekonomi secara merata di kalangan penduduk setempat;
3. Berfokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah yang memiliki potensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan dan memanfaatkan teknologi yang sesuai;
4. Mendorong semangat kompetisi yang konstruktif dan kerja sama dalam komunitas; dan
5. Mengoptimalkan peran pariwisata sebagai sarana pelestarian tradisi budaya dengan dampak negatif yang minimal.

Pearce (1995:67) mendefinisikan pengembangan desa wisata sebagai sebuah proses yang menitikberatkan pada cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Lebih khusus lagi, pengembangan desa wisata diartikan sebagai upaya untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Konsep ini berfokus pada peningkatan infrastruktur dan

fasilitas pariwisata untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas layanan bagi para wisatawan yang berkunjung.

1.6.2. *Community Based Tourism*

Dalam model pembangunan pariwisata CBT, partisipasi aktif masyarakat pedesaan sangat diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan, sehingga memberikan kesempatan terbesar bagi mereka untuk terlibat dalam industri pariwisata. Konsep CBT mengharuskan masyarakat terlibat sepenuhnya dalam semua aspek pembangunan pariwisata, dari perencanaan hingga pengelolaan, dengan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, peran masyarakat sebagai pemangku kepentingan sangat signifikan dalam pengembangan desa wisata dengan menggunakan model CBT.

REST (1997:14) mendefinisikan CBT sebagai jenis pariwisata yang memperhatikan aspek keberlanjutan dari segi lingkungan, sosial, dan budaya. Model pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh komunitas, serta bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk meningkatkan kesadaran mereka dan mempelajari kehidupan masyarakat dan budaya lokal.

Pada *community based tourism*, partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata sangatlah penting. Menurut Sunaryo yang dikutip oleh Nurhidayati (2007:197), terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan *community based tourism*, yaitu:

1. melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan dan pengambilan keputusan;

2. memastikan masyarakat lokal mendapat manfaat dari kegiatan pariwisata;
3. menjaga keberlanjutan lingkungan; dan
4. melestarikan karakter dan budaya lokal yang khas.

Suansri (2003:15) menyebutkan bahwa dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (CBT), ada beberapa aspek yang harus diberdayakan, yaitu:

1. Sumber daya alam dan budaya terpelihara dengan baik. Hal tersebut berkaitan dengan ekonomi lokal dan moda produksi yang bergantung pada penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Di sisi lain, adat istiadat dan budaya menjadi keunikan tersendiri yang dimiliki oleh desa wisata.
2. Organisasi Masyarakat. Keberadaan organisasi masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, norma, dan ideologi yang sama. Selain itu, masyarakat memiliki tetua yang memiliki pengetahuan dan kearifan tradisional setempat. Sehingga masyarakat memiliki rasa memiliki dan ingin berpartisipasi dalam pembangunannya sendiri.
3. Manajemen. Masyarakat memiliki aturan dan regulasi tersendiri dalam mengelola desa wisata. Mulai dari lingkungan, budaya, sampai dengan pariwisata. Selain itu, terdapat organisasi perantara pengelola desa wisata dengan masyarakat. Di sisi lain, terdapat manfaat yang didistribusikan secara adil kepada semua pihak dan persentase keuntungan dari pariwisata dikontribusikan ke dana masyarakat untuk pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat.
4. Pembelajaran. Kegiatan dan layanan pariwisata ini bertujuan untuk membina proses pembelajaran bersama antara tuan rumah dan tamu. Selain

itu, juga mendidik dan membangun pemahaman tentang budaya dan cara hidup yang beragam. Sehingga meningkatkan kesadaran konservasi alam dan budaya di antara wisatawan dan masyarakat setempat.

1.6.3. Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemajuan masyarakat, partisipasi mereka dianggap sebagai unsur yang sangat penting. Menurut Mubyarto, yang dikutip dalam Iqbal dkk. (2016:174), partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu proyek atau pembangunan agar berhasil, dengan memfokuskan perhatian pada masyarakat. Secara umum, partisipasi berhubungan dengan peran dan keterlibatan dalam aktivitas tertentu. Konsep partisipasi masyarakat membahas mengenai keterlibatan individu atau kelompok dalam serangkaian kegiatan yang efektif untuk pengambilan keputusan sehingga dapat memaksimalkan efektivitas kegiatan yang telah direncanakan. Sementara itu, menurut Notoatmodjo yang dikutip dalam Uceng dkk. (2019:22), partisipasi merujuk pada keterlibatan sukarela yang didasarkan pada kesadaran dan tanggung jawab kelompok dalam mencapai tujuan bersama.

Sastropetro, yang dikutip dalam Ibori (2013:3), juga mengemukakan bahwa partisipasi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pada kelompok dalam usaha mencapai tujuan bersama dan terlibat secara aktif dalam upaya yang terkait dengan tujuan tersebut, dengan bentuk keterlibatan yang bisa berupa pikiran, perasaan, dan mental seseorang. Partisipasi masyarakat, yang didasarkan pada kesadaran dan kemauan pribadi, merupakan fondasi penting dalam proses pengembangan mulai dari tahap perencanaan, pengambilan

keputusan, hingga perencanaan pengembangan berkelanjutan (Dewi dkk., 2013:134).

Prinsip-prinsip dalam partisipasi antara lain mencakup cakupan, kesetaraan dan kemitraan, transparansi, kesetaraan kewenangan, dan kesetaraan tanggung jawab. Menurut Conyers, yang dikutip dalam Fadil (2013:255), partisipasi masyarakat sangat penting karena tiga alasan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi tentang kondisi, sikap, dan kebutuhan masyarakat;
2. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proyek pembangunan dan memunculkan rasa memiliki terhadap proyek tersebut; dan
3. Partisipasi masyarakat memungkinkan hak demokrasi terwujud sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam menentukan jenis pembangunan yang diinginkan untuk mendukung pembangunan daerah mereka.

Cohen & Uphoff, sebagaimana dikutip oleh Ramadhan (2014:949), mengemukakan beberapa bentuk partisipasi masyarakat, antara lain:

1. *Participation in decision making* merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan/atau pembuatan kebijakan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat pada saat pengambilan keputusan mengenai rencana program pembangunan. Selain itu, masyarakat dapat memberikan pertimbangan mengenai program yang dijadikan prioritas berdasarkan

kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat dapat menentukan masa depannya secara demokratis.

2. *Participation in implementation* merupakan partisipasi masyarakat ketika program pembangunan yang ditetapkan bersama sedang berlangsung. Partisipasi masyarakat ini dapat dilihat melalui seberapa banyak dan sering masyarakat yang aktif dalam berpartisipasi. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menyumbangkan tenaga dan barang yang dapat menunjang agenda desa wisata.
3. *Participation in evaluation* merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil yang dicapai. Partisipasi ini dapat terjadi secara langsung, seperti terlibat langsung dalam proses pengawasan dan penilaian, atau secara tidak langsung, melalui pemberian masukan, kritik, atau keberatan.

Mengacu pada gagasan partisipasi masyarakat, pentingnya bukan hanya sebatas kontribusi finansial, tetapi lebih fokus pada pengembangan kemampuan masyarakat. Ini mencakup aspek-aspek seperti aktif dalam proses pengambilan keputusan, terlibat dalam pelaksanaan, dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Strategi pelaksanaan partisipasi diwujudkan melalui melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti berbagi informasi, merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, mengalokasikan sumber pendanaan, menjalankan program, dan mendistribusikan manfaat yang diperoleh. Partisipasi masyarakat terjadi sepanjang

rangkaian proses, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan serta pemerataan hasilnya.

Dari pandangan para ahli yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan pariwisata yang berfokus pada peran masyarakat, aspek partisipasi menjadi pokok perhatian. Keterlibatan masyarakat setempat menjadi dasar utama untuk menghadapi berbagai dampak strategis yang terkait dengan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam mencapai kesinambungan desa wisata dan untuk mewujudkan kualitas desa wisata yang optimal.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini lebih ditekankan pada prinsip ideal pengembangan *community based tourism* dan partisipasi masyarakat.

1. Community Based Tourism

a. Sumber Daya Alam dan Budaya

Adanya sumber daya alam terpelihara dengan baik, terdapat usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergantung pada penggunaan sumber daya alam berkelanjutan, dan adat istiadat serta budaya yang menjadi keunikan dari daerah tujuan.

b. Organisasi Masyarakat

Masyarakat memiliki suatu nilai yang dijunjung, biasanya berisi ajakan, pesan, atau larangan dalam rangka menjaga kelestarian desa wisata, mempunyai tetua yang berwawasan kearifan lokal, masyarakat memiliki rasa memiliki dan ingin berpartisipasi dalam pembangunannya sendiri.

c. Manajemen

Terdapat kebijakan dan peraturan yang mengatur pengelolaan lingkungan, budaya, dan pariwisata, serta adanya organisasi seperti kelompok sadar wisata yang bertanggung jawab dalam mengelola sektor pariwisata dan mengaitkannya dengan pengembangan masyarakat. Selain itu, manfaat dari pariwisata didistribusikan secara merata kepada semua pihak terkait, dan sebagian dari pendapatan pariwisata dialokasikan ke dana masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi dan sosial.

d. Pembelajaran

Proses pembelajaran bersama antara tuan rumah dan pengunjung, yang melibatkan pendidikan mengenai budaya dan cara hidup yang berbeda, serta meningkatkan kesadaran tentang pelestarian lingkungan dan budaya di kalangan wisatawan dan masyarakat setempat.

2. Partisipasi Masyarakat

- a. *Participation in decision making*; kesempatan masyarakat untuk membuat dan menilai keputusan atau kebijakan, mengemukakan pendapat.
- b. *Participation in implementation*; masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan program melalui tenaga, barang, dan uang.
- c. *Participation in evaluation*; menilai dan mengawasi agenda pembangunan melalui kritik dan saran.

1.8. Definisi Konsep

Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang dijadikan sebagai tempat tujuan wisata dengan menawarkan pengalaman yang otentik dalam budaya, kearifan lokal, dan alam yang masih asri. Tujuan pengembangan desa wisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan melibatkan partisipasi aktif mereka dalam seluruh tahap pengembangan.

Community based tourism merupakan bentuk pariwisata yang memperhatikan keberlanjutan dari sudut pandang lingkungan, sosial, dan budaya. CBT dikelola dan dimiliki oleh masyarakat setempat, dan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk meningkatkan kesadaran mereka dan mempelajari tentang kehidupan masyarakat dan budaya lokal.

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai hak masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelestarian, dan bukan hanya sebagai objek penerima manfaat. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran sebagai subjek pembangunan dan memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan, serta memiliki wewenang untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pembangunan.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2010:6), metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti dorongan, persepsi, sikap, tindakan, dan sebagainya dalam konteks tertentu. Penelitian ini melibatkan

pengumpulan data berupa kata-kata dan bahasa secara holistik dan deskriptif, dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Di sisi lain, teknik penelitian kualitatif, yang didefinisikan oleh Bog dan Taylor seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2010:4), melibatkan tahapan analisis yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tertulis dari beberapa orang yang diperoleh melalui pengamatan perilaku mereka.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana pengembangan *community based tourism* di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengembangan *community based tourism* serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan tersebut.

1.9.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen. Fokus utama dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber-narasumber yang terkait dengan pengembangan *community based tourism*. Penelitian ini juga menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan *community based tourism*.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah narasumber-narasumber yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Narasumber atau informan merupakan istilah sebutan dari subjek penelitian dalam penelitian kualitatif. Informan dipilih dan dipertimbangkan melalui *purposive sampling*. Mengadopsi pemikiran Creswell (1994) bahwa konsep *purposive sampling* dilakukan dengan

menyeleksi individu untuk diwawancarai atau diobservasi dengan tujuan didaparkannya informasi yang relevan dan memahami masalah apa yang sebenarnya terjadi.

Subjek penelitian dalam Pengembangan *Community Based Tourism* di Desa Wisata Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen melibatkan berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Dari masyarakat, beberapa individu yang terlibat adalah Aries Rustioko selaku Pengelola Desa Wisata Krikilan, Wijanto yang bertindak sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Krikilan, Etik Suyati sebagai Ketua UMKM Olahan Pangan, Kabul yang menjabat sebagai Ketua Paguyuban Shuttle, dan Sukoco yang memegang peran sebagai Ketua Pramuwisata Sangiran sekaligus Pemilik Toko Suvenir dan Pondok Wisata “Tanto”. Sementara itu, dari pihak pemerintah, Hani mewakili Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen, Aries berperan sebagai Sekretaris Desa Krikilan, dan Janto sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Krikilan.

1.9.4. Sumber Data

Peneliti memanfaatkan data kualitatif, yaitu data yang berupa deskripsi, interpretasi, atau narasi, bukan berupa angka atau statistik. Data ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

1.9.5. Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui beberapa metode berikut:

1. Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan informan, yang mencakup masyarakat Desa Krikilan, Pemerintah Desa Krikilan, serta Dinas Pariwisata Kabupaten Sragen.

2. Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dari sumber lain dan kemudian digunakan oleh peneliti untuk mendukung dan memperkaya informasi yang didapatkan dari data primer. Data ini diambil dari berbagai sumber, termasuk literatur, dokumen, penelitian terdahulu, berita, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber informasi lainnya yang relevan. Peneliti memastikan bahwa data atau dokumen yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang sesuai dengan penelitian ini.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data primer dan sekunder meliputi beberapa metode berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara pewawancara dan responden dengan tujuan mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Krikilan, pemerintah desa, serta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap perilaku, tindakan, dan interaksi yang terjadi di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan terhadap dokumen atau sumber informasi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang dianalisis dapat berupa buku, jurnal, laporan, artikel, surat kabar, brosur, situs web, dan sumber lainnya.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada tahapan penelitian. Model Miles dan Huberman terdapat empat tahapan analisis data penelitian yakni:

1. Pengumpulan data, data yang diperoleh dari wawancara diklasifikasikan berdasarkan masalah penelitian, kemudian digunakan untuk analisis model awal penelitian.
2. Reduksi data, data yang telah diperoleh dari lapangan diringkas dan dipilih hal-hal pokok untuk memfokuskan pada penelitian. Hasil akhir yang dicapai dari tahapan ini adalah rangkuman dari hasil penelitian
3. Penyajian data, Miles dan Huberman menyatakan bahwa teks naratif merupakan penyajian data yang paling sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Dari tahapan ini data yang diperoleh, diidentifikasi, dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.
4. Penarikan kesimpulan, setelah dari tiga tahapan tersebut ditarik kesimpulan dan pemeriksaan ulang hasil data penelitian.